



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR: 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota Kecamatan Sukoharjo, maka perlu diadakan suatu perencanaan umum tata ruang Kota Kecamatan Sukoharjo, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara optimal, serasi, terpadu, tertib, lestari dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1995

tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak mampu lagi menampung perubahan kebijakan Nasional dan Daerah serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dari pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan usaha sebagai tempat permukiman dengan watak dan ciri kehidupan kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kota Kecamatan Sukoharjo adalah kota yang terletak di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
10. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota secara berkelanjutan.
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RUTRK Kecamatan Sukoharjo adalah rencana rencana umum tata ruang kota di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG KOTA KECAMATAN SUKOHARJO

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RUTRK Kecamatan Sukoharjo didasarkan atas asas:

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan terpadu;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang serasi antar sektor, tertib, aman, sehat dan teratur;
- c. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- d. berdaya guna dan berhasil guna; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

RUTRK Kecamatan Sukoharjo dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

RUTRK Kecamatan Sukoharjo bertujuan:

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

RUTRK Kecamatan Sukoharjo mempunyai sasaran :

- a. pengaturan pertumbuhan kota agar berlangsung secara merata sehingga tidak terpusat di bagian Timur (Sukoharjo, Gayam, Joho, dan Jetis), dan menyebar ke arah Selatan (Mandan, Begajah, Combongan, Kenep, dan Banmati), Barat (Dukuh, Kriwen, dan Bulakan), dan Utara (Bulakrejo dan Sonorejo);
- b. menjadikan kota transit di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c. pengendalian perkembangan fisik berpola kota linier ke arah utara dan selatan;

- d. mempertahankan kawasan perkantoran, kesehatan, olah raga, perdagangan dan terminal bus;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Kecamatan Sukoharjo adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Kecamatan Sukoharjo;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Sukoharjo.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN SUKOHARJO

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang kota Kecamatan Sukoharjo yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo;
 - b. mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang;
 - c. mengatur hak dan kewajiban setiap orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota

Kecamatan Sukoharjo

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RUTRK Kecamatan Sukoharjo berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya didasarkan atas RUTRK Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.

Pasal 10

Dalam pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas

Tata Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui RUTRK Kecamatan Sukoharjo;
 - b. berperan serta dalam penyusunan RUTRK Kecamatan Sukoharjo, pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Sukoharjo.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas tata ruang Kota Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati RUTRK Kecamatan Sukoharjo.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

Kedudukan RUTRK Kecamatan Sukoharjo adalah:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan Kota Kecamatan Sukoharjo;
- c. merupakan dasar penyusunan Rencana Detail dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 14

RUTRK Kecamatan Sukoharjo mempunyai batas wilayah perencanaan sebagai berikut:

- a. batas Utara : wilayah Kecamatan Grogol;
- b. batas Selatan : wilayah Kecamatan Nguter;
- c. batas Timur : wilayah Kecamatan Bendosari;
- d. batas Barat : wilayah Kecamatan Tawang Sari dan Kabupaten Klaten.

Pasal 15

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Kecamatan Sukoharjo seluas 4.458 Ha.
- (2) Wilayah perencanaan RUTRK Kecamatan Sukoharjo meliputi 14 kelurahan di Kecamatan Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kenep	282
2	Banmati	339
3	Mandan	319
4	Begajah	217
5	Gayam	203
6	Joho	218
7	Jetis	192
8	Combongan	325
9	Kriwen	313
10	Bulakan	302

11	Dukuh	394
12	Sukoharjo	495
13	Sonorejo	415
14	Bulakrejo	444
J u m l a h		4.458

- (3) RUTRK Kecamatan Sukoharjo memuat materi-materi sebagai berikut:

- a. kebijakan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut sub kawasan atau unit lingkungan atau skala ruang tertentu apabila secara teknis tidak memungkinkan;
- b. rencana pemanfaatan ruang kawasan berisikan arahan pemanfaatan ruang yang berupa tata guna tanah;
- c. rencana sistem jaringan pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan kolektor primer dan jalan lokal primer yang ada di wilayah perencanaan;
- d. rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;
- e. rencana sistem jaringan utilitas berisikan arahan pola jaringan untuk sistem jaringan air bersih, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, listrik, telekomunikasi dan irigasi;

- f. rencana kepadatan bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukan dalam tiap unit lingkungan;
- g. rencana ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap unit lingkungan;
- h. rencana garis sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk unit lingkungan;
- i. rencana penanganan bangunan berisikan arahan penataan bangunan, dan utilitas dalam wilayah perencanaan;
- j. rencana tahapan pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 16

- (1) Jangka waktu RUTRK Kecamatan Sukoharjo berlaku selama 10 tahun.
- (2) KUTRK Kecamatan Sukoharjo ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kriteria dan tata cara peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki setiap orang dan masyarakat.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Pertama

Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Sukoharjo

Pasal 17

- (1) Peran Kota Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut:
 - a. sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam kedudukannya bersamaan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah;
 - b. sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sukoharjo;
 - c. sebagai pusat Sub Wilayah Pembangunan IV dan penggerak perkembangan wilayah dalam Sub Wilayah Pembangunan IV;
 - d. sebagai pusat pengendali dan pelaksana program-program pembangunan Kecamatan Sukoharjo;
 - e. sebagai pusat pelayanan umum tingkat Kabupaten;
 - f. sebagai pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, industri dan jasa.

- (2) Fungsi Kota Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut:
- a. sebagai wadah prasarana Pemerintah Kecamatan Sukoharjo dengan segala fasilitasnya;
 - b. sebagai wadah prasarana ekonomi dan sosial yang meliputi: pasar, perkantoran, bank, dan rumah sakit;
 - c. sebagai wadah prasarana pendidikan dan olah raga;
 - d. sebagai wadah bagi warga pendatang dalam melaksanakan aktivitasnya.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kota

Pasal 18

Strategi pengembangan Kota Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut:

- a. kearah Utara (Bulakrejo dan Sonorejo) dikembangkan untuk kawasan permukiman, pertanian, industri kecil dan perdagangan;
- b. kearah Timur (Sukoharjo, Jetis, Gayam, dan Joho) dikembangkan untuk kawasan Pusat kegiatan pemerintahan/perkantoran, perdagangan, industri, fasilitas sosial dan umum, permukiman, dan transportasi;
- c. kearah Selatan (Begajah, Mandan, Combongan, Kenep, dan Banmati) dikembangkan untuk kawasan fasilitas sosial dan umum permukiman dan pertanian;

- d. kearah Barat (Dukuh, Bulakan, dan Kriwen) dikembangkan, industri kecil dan menengah, perdagangan, fasilitas sosial dan umum, permukiman, dan pertanian.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan dan Pengendalian Kependudukan

Pasal 19

Mengarahkan penyebaran penduduk dari wilayah kota yang kepadatannya tinggi ke wilayah kota yang kepadatannya rendah.

Bagian Keempat

Pengembangan Tata Guna Tanah

Pasal 20

- (1) Pengembangan tata guna tanah diarahkan pada pola intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
- (2) Pola intensifikasi diarahkan pada wilayah yang telah terbangun yang tersebar di wilayah kota bagian Timur (Sukoharjo, Jetis, Gayam, dan Joho), bagian Utara (Bulakrejo dan Sonorejo), bagian Barat (Dukuh, Bulakan, dan Kriwen) dan bagian Selatan (Begajah, Mandan, Banmati, Kenep, dan Combongan) dengan pemanfaatan kembali fungsi-fungsi yang mengalami penurunan.
- (3) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikendalikan pengembangannya untuk membatasi perubahan

fungsi lahan secara drastis terutama pada tanah yang masih produktif sebagai lahan pertanian.

- (4) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan di lahan yang belum terbangun, terutama di wilayah kota bagian Utara dengan cara pengembangan prasarana yang dibutuhkan.
- (5) Tata Guna Tanah Kota Kecamatan Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 21

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana kota diperuntukkan pada efisiensi jangkauan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan unit lingkungan yang direncanakan.

BAB VI

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah

Pasal 22

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Sukoharjo dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK), terdiri atas Bagian Wilayah Kota I (BWK I), Bagian Wilayah Kota II (BWK II), Bagian Wilayah Kota III (BWK III), Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV), dan Bagian Wilayah Kota V (BWK V).
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK) di Kota Kecamatan Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I meliputi Kelurahan Sukoharjo, Gayam, Jetis, dan Joho dengan luas wilayah 1.108 Ha;
 - b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II meliputi wilayah Kelurahan Begajah dan Mandan dengan luas wilayah 536 Ha;
 - c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III meliputi wilayah Kelurahan Bulakrejo dan Sonorejo dengan luas wilayah 859 Ha;
 - d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Dukuh, Bulakan, dan Kriwen dengan luas wilayah 1.009 Ha;

- e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V meliputi wilayah Kelurahan Combongan, Kenep, dan Banmati dengan luas wilayah 946 Ha.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Struktur tata ruang Kota Kecamatan Sukoharjo terdiri atas fungsi primer dan fungsi sekunder.
- (2) Fungsi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkantoran pemerintahan yang melayani lingkup regional dan lokal;
 - b. terminal;
 - c. pusat perdagangan/pasar kota;
 - d. industri;
 - e. pusat kesehatan; dan
 - f. pendidikan.
- (3) Fungsi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkantoran pemerintahan untuk pelayanan lingkungan;
 - b. alun-alun;
 - c. toko, warung;
 - d. lingkungan perumahan; dan

- e. fasilitas/gedung pertemuan, kesehatan, peribadatan, taman kota.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Kota

Pasal 24

- (1) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) diperuntukkan sebagai pusat pelayanan umum, perkantoran tingkat kabupaten, perdagangan, jasa, permukiman, fasilitas sosial dan umum, campuran, pertanian, industri, dan transportasi, dengan dominasi fungsi kawasan sebagai pelayanan umum dan perkantoran tingkat kabupaten.
- (2) Bagian Wilayah Kota II (BWK II) diperuntukkan sebagai kawasan penunjang pusat kota, permukiman, pertanian, fasilitas sosial dan umum, transportasi, dan fungsi campuran, dengan dominasi fungsi kawasan sebagai permukiman.
- (3) Bagian Wilayah Kota III (BWK III) diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, fasilitas sosial dan umum, campuran, dan pertanian, dengan dominasi fungsi kawasan sebagai kawasan permukiman.
- (4) Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, industri non polutan, perdagangan, jasa, fasilitas sosial dan umum, campuran dan pertanian dengan dominasi fungsi sebagai kawasan industri non polutan, perdagangan dan jasa. Bagian Wilayah Kota V (BWK V)

diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, industri non polutan, fasilitas sosial dan umum, campuran dan pertanian dengan dominasi fungsi sebagai kawasan industri non polutan dan pertanian.

Bagian Keempat
Rencana Persebaran Penduduk
Pasal 25

- (1) Jumlah penduduk kota Kecamatan Sukoharjo sampai akhir tahun perencanaan diproyeksikan sebesar 95.584 jiwa.
- (2) Persebaran penduduk di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) kepadatan penduduk 33 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 37.051 jiwa;
 - b. Bagian. Wilayah Kota II (BWK II) kepadatan penduduk 24 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 12.609 jiwa;
 - c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) kepadatan penduduk 12 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 10.603 jiwa;
 - d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) kepadatan penduduk 20 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 19.972 jiwa;

- e. Bagian Wilayah Kota V (BWK V) kepadatan penduduk 16 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 15.322 jiwa;

Bagian Kelima
Rencana Pemanfaatan Ruang Kota
Paragraf 1
Rencana Permukiman
Pasal 26

- (1) Kebutuhan rumah untuk pengembangan permukiman sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah sebanyak 19.117 unit dengan persebaran mengacu pada rencana persebaran penduduk.
- (2) Pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan ke lokasi di luar pusat kegiatan Kota Kecamatan Sukoharjo, sehingga perkembangan kota menjadi merata.

Paragraf 2
Rencana Perkantoran
Pasal 27

- (1) Lokasi perkantoran pemerintahan berada di Bagian Wilayah Kota I (BWK I).
- (2) Lokasi perkantoran swasta yang mendukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri berada di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).

Paragraf 3

Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Lokasi fasilitas perdagangan dan jasa dialokasikan berada di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).
- (2) Jumlah fasilitas perdagangan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 1 pasar tradisional dan beberapa pasar modern, pertokoan, toko dan warung yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 1 pasar tradisional dan beberapa pasar modern, pertokoan, toko dan warung yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fasilitas perdagangan dan jasa yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK) I dan IV diarahkan untuk mendukung pengembangan Kota Kecamatan Sukoharjo menjadi Kota Transit.

- (4) Fasilitas jasa pemerintahan yang ada dipertahankan dan perlu ada peningkatan pelayanan fasilitas jasa pemerintahan sesuai kebutuhan pelayanan.
- (5) Fasilitas jasa komersial dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar.

Paragraf 4

Rencana Fasilitas Pendidikan

Pasal 29

- (1) Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK) I mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 18 TK/RA/BA, 21 SD/MI, 7 SLTP/MTs, 9 SMA/SMK/MA;
 - b. Bagian Wilayah Kota II (BWK) II mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 9 TK/RA/BA, 6 SD/MI, 2 SLTP /MTs, dan 1 SMA/SMK/MA;
 - c. Bagian Wilayah Kota III (BWK) III mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 9 TK/RA/BA, 8 SD/MI, 1 SLTP /MTs, dan 2 SMA/SMK/MA;
 - d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK) IV mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 6 TK/RA/BA, 7 SD/MI, 2 SLTP /MTs, dan 1 SMA/SMK/MA;

- e. Bagian Wilayah Kota V (BWK) V mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 6 TK/RA/BA, 13 SD/MI, 2 SLTP /MTs, dan 1 SMA/SMK/MA.
- (2) Fasilitas pendidikan yang telah ada tetap dipertahankan, sedang untuk perluasannya disesuaikan dengan tingkat skala pelayanan dan ketersediaan lahan.

Paragraf 5

Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 30

Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 rumah sakit, 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu, 4 Rumah Bersalin, 8 Tempat Praktek Dokter, 4 Balai Pengobatan dan 4 Apotik;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 rumah bersalin, 1 puskesmas pembantu, 3 tempat praktek dokter, 2 balai pengobatan, dan 1 apotik;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 rumah bersalin, 1 Puskesmas Pembantu, 3 tempat praktek dokter, 2 balai pengobatan dan 1 apotik;

- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 2 rumah bersalin, 1 puskesmas pembantu, 4 Tempat Praktek Dokter, 3 Balai Pengobatan dan 2 apotik.
- e. Bagian Wilayah Kota V (BWK V) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 puskesmas, 2 rumah bersalin, 3 tempat praktek dokter, 3 balai pengobatan dan 2 apotik.

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan meliputi Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katholik, Pura atau Vihara dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
- (2) Pengembangan atau penambahan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 7

Rencana Fasilitas Industri

Pasal 32

- (1) Fasilitas Industri pada Bagian Wilayah Kota I (BWK I) diperuntukkan bagi industri non polutan, bagi industri polutan

yang ada dipertahankan dengan tidak menambah luas area pabrik.

- (2) Fasilitas Industri pada Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) dan Bagian Wilayah Kota V (BWK V) diperuntukkan bagi industri kecil yang non polutan.
- (3) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditekankan pada industri yang bersifat padat karya.

Paragraf 8

Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 33

Fasilitas rekreasi dan olah raga yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan untuk tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas:

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 15 taman bermain dan 3 lapangan olah raga terbuka;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 5 taman bermain dan 2 lapangan olah raga terbuka;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 4 taman bermain dan 2 lapangan olah raga terbuka;

- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 8 taman bermain dan 1 lapangan olah raga terbuka;
- e. Bagian Wilayah Kota V (BWK V) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 6 taman bermain dan 1 lapangan olah raga terbuka.

Paragraf 9

Rencana Fasilitas Makam

Pasal 34

- (1) Tanah makam yang ada dipertahankan keberadaannya.
- (2) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di bawah 200 unit rumah, penyediaan tempat makam secara teknis dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan setempat.
- (3) Pengembang dengan jumlah rumah minimal 200 unit rumah harus menyediakan tempat makam dengan luas minimal 0,4 % dari luas lahan yang dikembangkan.
- (4) Penetapan lokasi dan luas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 10
Rencana Tata Hijau Kota
Pasal 35

- (1) Tata hijau kota berfungsi sebagai elemen peneduh, penyaring udara, elemen estetis, dan mendukung peresapan air hujan demi keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tata hijau kota meliputi taman, pekarangan, lapangan olah raga, makam, lahan pertanian, sempadan sungai, dan jalan.

Paragraf 11
Rencana Tanah Pertanian
Pasal 36

- (1) Tanah pertanian berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis peruntukannya dapat dipertahankan, diatur, diarahkan, dan dikendalikan untuk menunjang swasembada pangan.
- (2) Perubahan peruntukkan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 37

Sistem jaringan transportasi Kota Kecamatan Sukoharjo merupakan arahan jalur pergerakan dan penyediaan prasarana jalan.

Paragraf 13
Bagian-bagian Jalan
Pasal 38

- (1) Jalan kolektor primer pengaturannya adalah sebagai berikut:
 - a. damaja = 9 - 16 meter;
 - b. damija = 16 - 21 meter;
 - c. dawasja = 21 - 27 meter.
- (2) Jalan lokal primer pengaturannya adalah sebagai berikut:
 - a. damaja = 7 - 10 meter;
 - b. damija = 10 - 14 meter;
 - c. dawasja = 14 - 16 meter.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang berkaitan dengan damaja, damija, dan dawasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 14
Rencana Pengembangan Utilitas dan Irigasi
Pasal 39

- (1) Pengembangan Jaringan Air Bersih adalah sebagai berikut:
 - a. cakupan pelayanan air bersih ditargetkan sebesar 60% sampai akhir tahun perencanaan dengan prioritas untuk wilayah berkepadatan tinggi, perdagangan dan jasa;

- b. pelayanan air bersih BWK yang tidak ada jaringan PDAM akan dilayani dengan hidran umum 80% dari wilayah yang tidak terjangkau PDAM dan mengalami kekeringan, serta kualitas air tanahnya kurang baik;
 - c. kebutuhan rata-rata air bersih pada akhir tahun perencanaan 114 liter/detik, pemenuhannya dengan penambahan air baku dari Waduk Mulur sebesar 100 liter/detik;
 - d. pengadaan air bersih di luar air dangkal dan air permukaan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengembangan jaringan drainase (pematusan) adalah sebagai berikut:
- a. pengembangan sistem drainase ramah lingkungan, yaitu sistem drainase yang mengelola kelebihan air dengan cara peresapan secara alami;
 - b. pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*) pada sempadan sungai;
 - c. pengembangan saluran drainase di tepi jalan dengan pembuangan akhir ke sungai;
 - d. normalisasi Sungai Langsur sebagai drainase induk;
 - e. pemeliharaan seluruh saluran drainase secara periodik.
- (3) Pembuangan air limbah sebagai berikut:
- a. pembuangan limbah rumah tangga menggunakan sistem setempat (*on-site sanitation*) dan/atau dengan pembuatan sistem komunal (*off-site sanitation*) khususnya pada permukiman padat;

- b. air kotor dari limbah industri dan bengkel diberikan perlakuan khusus melalui pengendapan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke drainase umum atau upaya *treatment* dengan Instalasi Pengolah Air Limbah tersendiri.
- (4) Pengelolaan persampahan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampah permukiman dikelola oleh kelompok masyarakat dan diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - b. sampah non permukiman dikelola oleh penghasil sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - c. pengumpulan sampah diupayakan dengan memisahkan antara sampah organik dan non organik;
 - d. di kompleks perumahan, pasar, pusat perbelanjaan, dan industri, ditempatkan kontainer yang berfungsi sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - e. pada akhir tahun perencanaan dibutuhkan sekurang-kurangnya 5 buah *arm roll trucks* dan 1 buah *pressure waste truck* untuk menangani persampahan;
 - f. pengembangan sistem pengolahan sampah organik secara sederhana oleh masing-masing rumah tangga.
- (5) Pengaturan listrik adalah sebagai berikut:
- a. kebutuhan daya listrik minimal adalah 900 watt per rumah tangga;
 - b. keperluan daya listrik diluar rumah tangga (perkantoran, penerangan jalan, wisata) dialokasikan sebesar 20% dari kebutuhan rumah tangga;

- c. optimalisasi daya listrik dari Gardu Induk (GI) Solo Baru untuk melayani kota bagian utara, Gardu Induk (GI) Wonosari Klaten untuk melayani kota bagian selatan dan Gardu Induk (GI) Palur untuk melayani kota bagian timur;
 - d. kebutuhan daya listrik selain industri pada akhir tahun perencanaan adalah 18.189 KVA.
- (6) Pengembangan prasarana telekomunikasi diprioritaskan untuk perkantoran, industri, perdagangan, jasa, permukiman dan ditempatkan pada ruas jalan utama disesuaikan dengan permintaan.
- (7) Pengaturan jaringan irigasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan saluran irigasi yang ada untuk mengairi lahan persawahan yang masih dipertahankan;
 - b. menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang sudah ada dengan pengamanan tanggul, saluran dan bangunan pelengkap agar tetap berfungsi dengan baik.

BAB VII

RENCANA TATA BANGUNAN

Bagian Pertama

Rencana Garis Sempada Bangunan

Pasal 40

- (1) Letak garis sempadan ditentukan sebagai berikut:

- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada jalan arteri di kawasan yang akan dikembangkan minimal 2 m, sedang GSB pada jalan kolektor minimal 2 m;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada jalan lokal di kawasan yang akan dikembangkan minimal 1,5 meter;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada jalan Kereta Api di kawasan yang akan dikembangkan minimal 13 m dihitung dari as jalan baja (rel KA);
 - d. Sempadan sungai sebesar 10-15 m. Kawasan Sempadan sungai diarahkan untuk pengembangan jalan inspeksi dan kawasan konservasi lingkungan berupa jalur hijau.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan

Pasal 41

Kepadatan bangunan diatur dengan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman memiliki kepadatan sedang sampai rendah yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%, Koefisien Lantai

- Bangunan (KLB) 1 sampai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1;
- b. Kawasan perdagangan memiliki kepadatan tinggi yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2;
 - c. Kawasan campuran memiliki kepadatan rendah sampai tinggi yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1 sampai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1.

Pasal 42

Ketinggian bangunan gedung di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) pengaturan sebagai berikut:

- a. kawasan permukiman dengan maksimal ketinggian 3 lantai atau 18 meter;
- b. kawasan komersial dengan ketinggian maksimal 8 lantai atau 40 meter;
- c. kawasan campuran dengan ketinggian maksimal 4 lantai atau 24 meter.

BAB VIII

RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 43

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan selama sepuluh tahun yang dibagi dalam 2 (dua) tahap lima tahunan.

- (2) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Buku Rencana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 44

Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Sukoharjo diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK Kecamatan Sukoharjo diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang

Kota Kecamatan Sukoharjo secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk uraian buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, dan Buku Rencana Umum sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

SOEWITO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukoharjo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan perubahan kebijakan Nasional maupun daerah dewasa ini sehingga perlu diadakan peninjauan kembali.

Sehubungan hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan peran dan fungsi Kota Sukoharjo sebagai kota pusat pengembangan Sub Wilayah Pembangunan IV Kabupaten Sukoharjo yang dapat menampung perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah maka perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian “menghormati hak yang dimiliki orang” adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber pembiayaan” adalah APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Loan, Swasta/Investor dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“Pasar tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

“Pasar modern” adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Department Store dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

“Pertokoan” adalah suatu wilayah lingkungan / tempat / bagian perkotaan di mana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan

secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi, di mana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.

“Toko” adalah tempat/bangunan yang diperuntukan bagi perorangan/perusahaan/koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung, kepada konsumen.

“Warung” adalah perorangan yang melakukan penjualan berbagai keperluan sehari-hari pada suatu tempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “industri kecil” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp1.000.000.000,00 atau kurang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “taman bermain” adalah lokasi yang dapat digunakan untuk bermain yang meliputi halaman sekolah, lapangan bola volley, lapangan bulu tangkis *out door*, lapangan tenis dan sejenisnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “garis sempadan bangunan” adalah garis batas yang diperbolehkan untuk suatu bangunan terhadap as jalan, as sungai, batas persil atau suatu batasan lain yang ditentukan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 123